PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU *MONEY LAUNDERING* BERKEDOK INVESTASI MELALUI *TRADING*

Ihda Aniqoh¹, Ahmad Mahyani²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: ihdaaniq@gmail.com¹, mahyani.fh@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT

Money laundering crimes often occur in parts of the world, including Indonesia. Money laundering is an activity in which a person keeps or does not reveal the origin of the proceeds of crime through various transactions so that the property appears to have originated from a legitimate act. Money laundering has 3 (three) stages, namely placement, layering and integration. Over time, money laundering can be done in any way, one of which is through investment or trading. This study uses a normative juridical method using statutory, conceptual and case approaches. This study discusses criminal responsibility for money laundering actors under the guise of investment through trading. The results of this study show that Decision Number 71/Pid.B/2022/PN Tbn. The judge decided to sentence the perpetrators of investment fraud through trading to imprisonment for 3 years and 8 months using the basis of Article 378 juncto Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code.

Keywords: *Fraud, Investment, Crime*
Keywords: *Fraud, Investment, Crime*

ABSTRAK

Tindak pidana money laundering uang kerap terjadi di belahan dunia, diantaranya adalah Indonesia. Money laundering adalah kegiatan di mana seseorang menyimpan atau tidak memperlihatkan asal mula harta benda hasil kejahatan melalui bermacam transaksi agar harta benda tersebut seakan berasal dari perbuatan yang sah. Pencucian uang memiliki 3 (tiga) tahapan yaitu penempatan, pelapisan dan integrasi. Seiring perkembangan waktu, pencucian uang bisa dilakukan dengan cara apa saja, salahsatunya melalui investasi atau trading. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku money laundering yang berkedok investasi melalui trading. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tbn. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penipuan investasi melalui trading selama 3 tahun 8 bulan dengan menggunakan dasar Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kata kunci: Penipuan, Investasi, Tindak pidana

PENDAHULUAN

Belakangan ini investasi sedang ramai dibicarakan di penjuru Indonesia. Mulai dari investasi dalam bentuk trading, saham, reksadana, emas, obligasi, properti, deposito berjangka dan lain sebagainya. Investasi sendiri ialah aktivitas menanamkan modal berupa uang atau barang berharga lainnya pada suatu lembaga/badan terkait dengan harapan agar penanam modal memperoleh keuntungan lebih setelah jangka waktu tertentu. Maraknya investasi di Indonesia menyebabkan adanya penyalahgunaan di bidang tersebut. Banyaknya investasi bodong yang terjadi saat ini, membawa dampak negatif terhadap dunia investasi.

Peristiwa tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai investasi, sehingga pelaku dengan mudah membujuk masyarakat dengan iming-iming bahwa dengan menitipkan modal sedikit saja dapat memperoleh keuntungan yang berlipat dalam waktu yang sangat cepat.

Seiring dengan majunya zaman, kegiatan investasi menarik perhatian banyak orang sehingga ada yang menyalahgunakannya dengan cara mengadakan investasi bodong yang tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri dan membohongi orang lain. Setelah mendapatkan keuntungan yang melimpah dari orang lain maka muncul ide untuk menyimpan atau membelanjakan hasil tersebut untuk dibelikan luxury things seperti mobil, rumah, perhiasan dan lain sebagainya. Biasanya dengan cara menyimpannya di tabungan atau menyalurkan ke rekening lain agar seolah uang tersebut didapatkan dengan cara yang benar, atau biasa disebut juga dengan money laundering.

Proses pencucian uang itu sendiri kompleks dan rumit. Pencucian uang menurut definisi adalah tindakan menyalurkan dana terlarang melalui saluran keuangan luar untuk membuat dana tersebut tampak sah (McDowell & Novis, 2001). Di masa lalu, pencucian uang adalah biasanya dilakukan melalui usaha kecil yang mapan atau bahkan melalui saluran keuangan perusahaan besar. Namun dengan munculnya internet, proses pencucian uang telah pindah ke ranah digital.

Pencucian uang dianggap sebagai masalah besar bagi masyarakat di seluruh dunia karena tindakan individu kriminal, serta bisnis dan organisasi terlarang menerima dana mereka dari sumber ilegal dan tidak etis seperti penipuan, korupsi, pekerja anak dan budak, prostitusi, narkoba, senjata, dan kegiatan teroris. Akibatnya, pencucian uang merusak kesejahteraan dan kinerja ekonomi global (Buchanan, 2004).

Kejadian bermula saat IAAP atau terdakwa memiliki hubungan pertemanan dengan SZB (terdakwa dengan penuntutan dalam berkas perkara berbeda oleh Kejaksaan Negeri Lamongan), di bulan Desember 2021-Januari 2022 yang sudah tidak bisa diingat tanggalnya, telah merugikan puluhan korban yang bertempat di Kabupaten Tuban sebesar Rp 7.481.025.000,00. SZB menyampaikan kepada Terdakwa jika dirinya memiliki usaha investasi atau trading yang hasilnya berlipat ganda yang mana bila terdapat orang yang ikut, terdakwa mendapatkan keuntungan bila invest sebesar Rp 500.000,00 selama 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan Rp 350.000,00 atau menjadi Rp 850.000,00 bila invest sebesar Rp

800.000,00 maka akan mendapatkan keuntungan Rp 400.000,00 atau menjadi Rp 1.200.000,00 dan bila invest sebesar Rp 1.000.000,00 maka akan mendapatkan keuntungan Rp 600.000,00 atau menjadi Rp 1.600.000,00.

Kemudian terdakwa tertarik dengan investasi tersebut tanpa melakukan keabsahan usaha tersebut lalu SZB meminta bantuan Terdakwa untuk mengumpulkan dana dari orang-orang yang ingin ikut investasi kepadanya tersebut. Selanjutnya Terdakwa mempunyai tugas untuk mengumpulkan dana dari orang yang ingin melakukan investasi. Untuk meyakinkan agar ada yang mau menanamkan dana tersebut, Terdakwa membuat story melalui instagram dengan nama akun nitip invest 2021, akun tersebut adalah milik Terdakwa dan melalui whatsapp dengan kalimat ajakan “siapa yang ikut invest pada saya bila invest Rp 500.000,00 selama 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan Rp 200.000,00 atau menjadi Rp 700.000,00 bila invest sebesar Rp 800.000,00 maka akan mendapatkan keuntungan Rp 300.000,00 atau menjadi Rp 1.100.000,00 dan bila invest sebesar Rp 1.000.000,00 maka akan mendapatkan keuntungan Rp 400.000,00 atau menjadi Rp 1.400.000,00.

Terdakwa menjelaskan investasi yang ditawarkan dengan rincian sebagai berikut: Slot ke 1 sebesar Rp 500.000,00 dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan Rp 700.000,00, slot ke 2 sebesar Rp 800.000,00 dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan Rp 1.100.000,00, slot ke 3 sebesar Rp 1.000.000,00 dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan Rp 1.400.000,00. Terdakwa juga menyampaikan jika investasi gagal maka uang akan dikembalikan 100 persen. Terdakwa telah menyiapkan 3 (tiga) rekening antara lain rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3890585867, nomor rekening 8240847109, nomor rekening 8240836646, yang kesemuannya atas nama IAAP.

Setelah mengumpulkan dana yang berasal dari para saksi, Terdakwa mentransferkan kepada SZB selaku owner investasi trading dan Terdakwa kemudian mendapatkan transfer dari SZB sebagai keuntungan yang diperjanjikan diawal setelah 10 (sepuluh) hari sejak para saksi mentransferkan dana ke Terdakwa, setelah itu beberapa saksi atau korban kembali mentransfer dana ke Terdakwa sebagai investasi, namun ternyata sejak 1 Januari 2022 setelah memasuki jatuh tempo untuk pembayaran keuntungan kepada para saksi korban, Terdakwa tidak pernah lagi mentransferkan keuntungan yang dijanjikan serta tidak mengembalikan uang yang telah ditransferkan para saksi korban. Lalu keuntungan yang diperoleh Terdakwa, diperoleh dari selisih keuntungan yang didapat dari Samudra Zahrotul

Bilad yang diserahkan kepada investor dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Suatu peraturan haruslah selaras, tidak boleh bertentangan dengan lainnya. Peraturan yang tidak selaras atau tidak harmonis dengan peraturan lain akan menimbulkan ketidakpastian juga ketidakadilan dalam hukum. Keadilan memang menjadi tuntutan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sementara hukum sendiri berfungsi mengatur ketertiban masyarakat, sehingga jelas hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, walaupun disamping keadilan, hukum juga memiliki tujuan-tujuan lainnya, yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum (Mahyani, 2019).

Di Indonesia sendiri investasi di atur dalam beberapa sektor seperti pada sektor perbankan, yaitu dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Juncto Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada sektor badan pengawas keuangan atau OJK yang dimuat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan lain sebagainya.

Ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama dengan penulis, yang pertama adalah jurnal penelitian yang ditulis oleh Kristopher McKay Duffin, Chad Albrecht, Victor Manuel Morales Rocha dan Conan Albrecht dengan judul *The Use of Cryptocurrencies in the Money Laundering Process* yang berfokus pada proses pencucian uang menggunakan cryptocurrency dan perspektif otoritas serta regulasinya (Albrecht et al., 2019).

Selanjutnya adalah jurnal penelitian oleh Gonaricha Amelia yang berjudul *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan EDCCash (E-Dinar Coin Cash) Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan fokus modus operandi yang digunakan dalam Penipuan Investasi Kripto Ilegal di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) dan Penuntutan Pidana Penipuan Investasi Kripto Ilegal di Perusahaan (E-Dinar Coin Cash) EDCCash.* (Gonaricha Amelia & Ade Mahmud, 2022).

Yang terakhir adalah jurnal penelitian yang ditulis oleh Ali Geno Berutu dengan judul *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam yang berfokus pada aturan dan*

Pencegahan Tindak Pidana Money Laundering di Indonesia & Cara Mengatur Tindak Pidana Money Laundering menurut Islam dalam Hal Ini Fiqh Jinayat (Geno, 2019).

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan *money laundering* berkedok investasi melalui *trading*?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan norma, asas dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum. Kajian hukum standar dilakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan hukum yang terjadi. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang disajikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Peipuan Investasi melalui *Trading*

Perbuatan pidana adalah tindakan yang dibatasi oleh norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika larangan itu tak ditaati maka akan dikenakan sanksi yang berlaku yaitu berupa pidana bagi mereka yang dengan sadar melanggar peraturan perundang-undangan. Penipuan berasal dari kata cheat/menipu yang dimaksud dengan suatu perbuatan mengucapkan kata-kata yang memiliki arti kebohongan dengan maksud mencari keuntungan dari pihak lain untuk diri sendiri dan merugikan pihak lain (Widodo & Efendi, 2014).

Perbuatan penipuan diklasifikasikan ke dalam predicate crime yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Money laundering, di mana akan diancam dengan sanksi pidana penjara 4 tahun/lebih. Money laundering adalah suatu perilaku/perbuatan yang dilaksanakan oleh satu orang/lebih yang memiliki akal jahat terhadap uang atau dana yang ilegal, berupa dana yang berasal dari kegiatan penyimpangan, yaitu menggunakan cara menghilangkan asal dana yang didapatkan itu dari pihak yang terkait, tugasnya yaitu melakukan tindakan yang terkait

dengan perbuatan kejahatan dengan cara menginput dana tersebut ke suatu sistem keuangan (financial system), jika dana tersebut telah masuk kemudian ditarik dari financial system jadi status uang tersebut yang sebelumnya ilegal berubah jadi legal (Sutedi, 2008).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tindak pidana money laundering ada 3 tahapan, yakni penempatan, pelapisan dan menggunakan harta kekayaan (Nugroho et al., 2016). Di dalam pasal 378 KUHP digunakan untuk menangkap tersangka yang melakukan perbuatan pidana pencucian uang yang bersifat obyektif dan subyektif sedemikian rupa sehingga menginvestasikan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan atau menukarkan dengan mata uang lain untuk kegiatan yang patut diduga sebagai kegiatan perolehan secara pidana. Tindak pidana penipuan melalui investasi dalam kasus perkara yang terkait, juga disertai adanya turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara terus-terusan sebagai perbuatan yang dilanjutkan Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung beberapa unsur di bawah ini:

1. Barangsiapa;

Pada unsur barangsiapa diartikan sebagai orang pribadi atau subjek hukum yang diajukan di dalam pengadilan sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani & rohani. Bisa diminta pertanggungjawaban pidana apabila semua perbuatannya memenuhi unsur dalam pasal yang bersangkutan. Orang yang disebut di sini adalah Terdakwa IAAP Binti WP, identitas yang diajukan oleh JPU sebagai terdakwa di persidangan, kemudian setelah diperiksa dalam pengadilan, identitas IAAP sama dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan & berkas perkara lainnya, dan identitas sebenarnya diakui oleh terdakwa dan para saksi, bahwa terdakwa sehat wal afiat, terdakwa juga bisa menjawab dengan benar semua pertanyaannya selama persidangan, jika perbuatannya memenuhi semua itu dapat dianggap cakap dan bertanggung jawab secara pidana.

2. Memiliki maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum;

Perkataan "maksud" disini ialah tujuan yang akan dicapai, dalam hal ini adalah untuk mencari keuntungan dirinya sendiri/orang lain dan pencapaian tujuan itu dilakukan dengan menantang hukum. Apabila dikaitkan dengan "kesengajaan" (*opzetelijke*), yang dalam doktrin sudah dikenal adanya 3 bentuk kesengajaan, artinya kesengajaan yang bermaksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar pasti (*opzet bij zekerheids bewuszijn*) & kesengajaan dengan sadar mungkin (*opzet bij mogelijkheids bewuszijn*)

maka kata “dengan maksud” di pasal yang merupakan terjemahan dari “*met het oogmerk*” harus ditafsirkan sebagai “*opzet*” dalam arti sempit/hanya “*opzet als oogmerk*” (kesengajaan dengan mempunyai kehendak).

3. Menggunakan nama samaran atau reputasi, tipuan, atau serangkaian kebohongan untuk memaksa orang lain menyerahkan sesuatu kepadanya, menimbulkan hutang, atau menghapus hutang;

Oleh karena terdiri dari beberapa tindakan atau cara yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau dapat pula terdiri dari beberapa perbuatan atau cara secara bersamaan, maka terlebih dahulu harus dijelaskan pengertian atau arti dari masing-masing perbuatan atau cara tersebut. Definisi “nama palsu” adalah nama seseorang yang bukan namanya sendiri dari si pelaku/sebuah nama yang tidak satu orangpun menggunakannya/namanya sendiri tapi tak diketahui oleh masyarakat umum, sedangkan “sifat palsu” tidak harus bermakna pangkat, jabatan atau pekerjaan lainnya melainkan apabila dia berkata “berada dalam keadaan tertentu” di mana dia memiliki hak tertentu.

Pengertian dari “tipu muslihat” yakni tindakan yang memunculkan kepercayaan/memberikan kesan kepada orang seolah keadaannya sesuai, sedangkan pengertian dari perkataan “susunan kata-kata bohong” adalah perbuatan yang terdiri atas suatu “pembicaraan” yang tidak benar, tetapi terdiri dari tindakan-tindakan di mana kata-kata harus saling berhubungan dan kata-kata yang disusun dan digunakan harus terjalin sehingga kata yang satu seolah-olah membenarkan kata yang lain.

4. Orang yang melaksanakan, menyuruh melaksanakan, dan yang turut berpartisipasi melaksanakan perbuatan;

Penyertaan ini ada 2 (dua) pandangan yaitu:

- a. Pandangan pertama yang menyatakan: penyertaan merupakan perdebatan pertanggungjawaban pidana & bukan termasuk delik karena tidak sempurna bentuknya sehingga penyertaan dilihat sebagai bisa diperluasnya pertanggungjawaban pidana pelaku.
- b. Pandangan ke-2 menyatakan: bahwa penyertaan merupakan ketentuan yang memberi arti perluasan terhadap aturan yang tertuang dalam undang-undang, yang berarti penyertaan adalah perluasan terhadap tindakan bisa dipidana.

Berdasarkan 2 (dua) pandangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang bisa dimintai pertanggungjawaban & bukan delik yang tegak sendiri. Hal itu didasarkan oleh argumentasi bahwa pertama, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Ke-1 KUHP, ke-2 adalah bab mengenai penyertaan membahas tentang siapa saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi penyertaan bukan difokuskan di perbuatannya melainkan pada pelaku, yang ke-3 adalah dalam dakwaan Penuntut Umum, pasal tentang penyertaan harus dijunctokan dengan pasal lain yang terkait dengan pelanggaran/kriminal.

Menimbang bahwa yang bisa dipidana sebagai pelaku penyertaan dalam perbuatan pidana adalah plegen atau pelaku, doenplegen/orang yang menyuruh melakukan, medeplegen/orang yang turut serta melakukan & uitloker/orang yang mengunjukkan, sedangkan medeplichtige/ yang ikut berpartisipasi adalah pembantu pada saat sebelum dan sesudah kejahatan dilakukan. Berdasarkan dakwaan PU (Penuntut Umum) yang mendakwa Terdakwa dengan memberikan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pelaku tindak pidana terklasifikasi sebagai mereka yang melaksanakan, yang menyuruh melaksanakan & yang turut serta melaksanakan perbuatan sehingga pelaku yang terklasifikasi sebagai uitloker dan medeplichtige tidak perlu diuraikan dalam pertimbangan putusan ini karena uitloker dan medeplichtige merupakan penjabaran dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Plegen atau pelaku berdasarkan doktrin Hazewinkel Suringa adalah seseorang yang dengan sendirinya memenuhi semua unsur kejahatan sehingga pelakunya bukan merupakan peserta tetapi dapat dipidana karena telah melakukan kejahatan tersebut. Dalam doenplegen atau orang yang menyuruh lakukan terdapat 2 orang/lebih yang ikut serta dalam perbuatan pidana dengan kedudukan yang tidak sama. Orang yang memerintah (manus domina/middelijke dader), dan yang diperintah (onmiddelijke dader/manus ministra). Doenplegen (middelijk daderschap). Artinya, seorang bersedia melakukan tindak pidana, tetapi tidak mau melakukannya sendiri, sehingga ia memanfaatkan orang lain yang diperintahkan untuk melakukan tindak pidana itu. Medeplegen atau orang yang turut serta berdasarkan doktrin dari Pompe adalah ketika satu orang bersama orang lain melakukan pelanggaran dalam arti masing-masing atau sekurang-kurangnya semua melakukan unsur-unsur pelanggaran yang dimaksud, tetapi medeplegen tidak wajib melakukan setiap unsur pelanggaran.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya pada Forum Prevelegiatum (pengadilan khusus untuk pejabat negara yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang mana dilakukan di MA sebagai pengadilan tingkat pertama & terakhir) tanggal 23 Desember 1955 (Putusan MA Republik Indonesia Nomor: 1/1955/MA Pid menganut penyertaan yang ekstensif, artinya Majelis Hakim menyatakan bahwa para peserta dalam bentuk penyertaan turut serta melakukan tindak pidana tidak perlu melakukan perbuatan yang sama (materiil) dan tidak perlu juga punya sifat pribadi (persoonlijk) yang sama dengan pelaku sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik. Menurut Mahkamah Agung, dalam hal 2 orang/lebih dituntut bersama & bersekutu melaksanakan Tindakan kriminal tersebut, para pelaku tidak mesti di antaranya memenuhi semua unsur yang oleh pasal tersebut dirumuskan dalam delik itu.

Berdasarkan Putusan MA Republik Indonesia Nomor: 525K/Pid/1990 tgl 31 Mei 1990 (termuat di halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni bahwa untuk bisa dikualifikasi sebagai ikut serta melaksanakan tindakan pidana “dalam arti kata bersama-sama melakukan” paling sedikit harus ada 2 orang, yang dimaksud adalah orang yang melaksanakan & orang yang ikutserta melaksanakan perbuatan pidana itu. Misalnya, dalam hal ini jika dua orang telah melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, yaitu unsur-unsur delik, tetapi hanya perbuatan persiapan atau pembantuan, pembantunya tidak terlibat dalam perbuatan itu dan tidak diperbolehkan. peserta yang disertakan. Menurut P.A.F Lamintang meyakini pendapatnya: “Agar medeplegens ada bersama, setiap aktor harus memiliki niat dan pengetahuan yang diperlukan. Mengakui kolusi membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian bahwa pengetahuan dan niat masing-masing pihak benar-benar ada.”

Apabila dikaitkan dengan kasus ini, maka syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SZB (penuntutan dalam berkas perkara berbeda oleh Kejaksaan Negeri Lamongan) memiliki inisiatif atau tujuan yang sama, dan melakukan perbuatannya bersama-sama. Mengenai unsur “Perbuatan dilakukan secara bersama-sama” sesuai dalam Pasal 55 KUHP, menurut pendapat Mahkamah Agung dalam buku Yurisprudensi MA RI tahun 2004, Hal 576, maka harus dibuktikan adanya kesadaran kerjasama secara fisik antara Terdakwa bersama-sama dengan SZB (penuntutan dalam berkas perkara berbeda oleh Kejaksaan Negeri Lamongan).

5. Apabila antara beberapa perbuatan sangat berkaitan sehingga masing-masing harus dianggap sebagai rangkaian perbuatan meskipun sendiri-sendiri adalah kejahatan/kerugian.

Dalam dakwaannya Penuntut Umum menyuntokan pasal 378 dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang konstruksi yuridisnya “Jika banyak perbuatan perhubungan, Oleh karena itu, harus dianggap sebagai perbuatan yang terus-menerus, sehingga setiap perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau kerugian, tetapi hanya satu pidana yang berlaku. Oleh karena itu unsur ini mengandung arti perbuatan yang satu dengan yang lain berhubungan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, karena timbul adanya suatu kehendak dengan perbuatan yang semacam serta dalam tenggang waktu berjenjang.

Beberapa tindakan terkait harus memenuhi persyaratan berikut untuk dianggap sebagai tindakan pengetahuan dan praktik berkelanjutan:

- a. Harus timbul dari suatu niat, kehendak, atau keputusan.
- b. Tindakan harus sama.
- c. Waktu antara tidak boleh terlalu lama.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan penjelasan para saksi & terdakwa tentang alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan, Terdakwa ikut investasi atau trading dan menjadi reseller dari SZB tanggal 10 November 2021, bahwa tugas Terdakwa sebagai reseller adalah mencari member untuk ikut dalam investasi atau trading tersebut. Untuk meyakinkan para member melakukan investasi pada Terdakwa maka selain memposting akan adanya keuntungan yang akan didapat para member maka Terdakwa memposting dalam story whatsapp investasi atau trading tersebut adalah aman, dan jika loss atau kalah uang akan dikembalikan 100% (seratus persen), sehingga para saksi atau member percaya dan juga tertarik akan keuntungan yang diposting Terdakwa di history whatsappnya, sehingga para member kemudian mentransfer dana investasi ke rekening Terdakwa, akan tetapi kemudian berdasarkan barang dan alat bukti serta keterangan saksi & dibenarkan Terdakwa akibat dari perbuatan Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian yang diderita para member atau saksi korban sebesar 7.481.025.000,00.

Berdasarkan keterangan para saksi serta diakui oleh Terdakwa pada awalnya para member mendapatkan keuntungan dari dana investasi yang disetor ke rekening Terdakwa

akan tetapi para member mulai tidak mendapat pencairan mulai tanggal 28 Desember 2021, lalu Terdakwa menyampaikan kepada para member hal tersebut dikarenakan natal dan tahun baru uangnya tidak bisa di withdraw dari aplikasi dan kemudian Terdakwa menyampaikan lagi apabila dana investasi tersebut telah Terdakwa transfer kepada SZB dan SZB belum mentransfer kembali baik modal dan keuntungan dana investasi para member tersebut kepada Terdakwa.

Terdakwa mengakui dipersidangan tidak pernah memberitahukan kepada para member adanya perjanjian Samudra Zahrotul Bilad dengan Terdakwa dalam investasi/trading tersebut, para saksi hanya mengetahui investasi tersebut dikelola oleh Terdakwa sendiri dan oleh karena pada akhirnya dana investasi tersebut tidak cair dan dana modal investasi yang telah disetor para member ke rekening Terdakwa juga tidak dapat kembali 100 % (seratus persen) sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa kepada para member sehingga mengakibatkan para member.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta uraian pertimbangan dalam unsur kedua dan ketiga diatas yang turut diambil menjadi bagian dalam pertimbangan dalam unsur ini maka Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya bahwa perbuatan Terdakwa sejak bulan November 2021-bulan Januari 2022 bertempat di beberapa Kabupaten Tuban dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat, menggerakkan orang lain/para member/para korban untuk menyerahkan dana kepadanya yakni dana investasi/trading, menunjukkan bahwasanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali dengan niat yang sama yaitu agar para member/para saksi korban dapat menyerahkan uang investasi/trading kepadanya sehingga bisa dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut. Jadi unsur "Sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi. Beralaskan beberapa pertimbangan unsur tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 378 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah terpenuhi, menurut hukum sah seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternatif oleh kesatu Penuntut Umum.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan terhadap Pelaku

Secara etimologi pengertian hakim adalah seseorang di dalam pengadilan yang dianggap paham hukum, di mana dibebani tugas & tanggungjawab menegakkan keadilan dan hukum, baik secara tertulis maupun tak tertulis, kurang jelas, atau pura-pura kurang jelas.

Juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan landasan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME. Hakim memiliki peran sebagai pengambil keputusan tidak boleh melebihi hukum yang berlaku atau peraturan yang berlaku demi menegakkan keadilan sebenarnya. Hakim bersifat menjatuhkan pidana, tetapi dalam menjatuhkan pidana hakim hanya sebatas menjatuhkan pidana menurut hukum pidana yang ada, dan dalam menjatuhkan pidana dalam bentuk apapun tidak menjatuhkan pidana apapun Suka sangat sulit. Ya, karena hakim bebas memutuskan atau menentukan jenis tindak pidana, jenis pidana dan besarnya pidana. (Pendapat et al., 2011).

Pertimbangan hakim adalah nilai yang dibuat oleh Majelis Hakim dan tertanam dalam keputusan hakim, termasuk unsur keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum & manfaatnya bagi pihak yang terkena dampak mencari keadilan. Ini adalah perspektif Universitas Keadilan. Hakim sendiri harus cermat dan teliti sebelum mengambil keputusan, dan tidak boleh kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung berdasarkan alasan hakim. Hakim berurusan dengan barang bukti dan hal-hal penting lainnya dalam pemeriksaan suatu perkara, dan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara yang akan dibahas di pengadilan. Di sini untuk memperoleh suatu putusan pengadilan yang mencapai keadilan adalah dengan menetapkan kepastian hukum atau fakta-fakta yang benar adanya & nyata menurut kronologi kejadian sebenarnya. (Arto, 2004).

Dalam kaitannya dengan pengidentifikasian aturan hukum, kita sering menjumpai situasi di mana aturan hukum dibuat melampaui istilah kesempurnaan. Karena norma hukum ini dibuat oleh orang-orang yang tidak sempurna pada kenyataannya. Banyak kekurangan dalam aturan hukum, contohnya kekosongan hukum, terjadinya pertentangan antara aturan hukum dengan aturan lain, atau kenyataan bahwa aturan itu dapat dikatakan rancu. (Mardhatillah & Mahyani, 2019).

KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d mengatur bahwa dalam memutuskan bahwa dalam menyelenggarakan sidang, rangkuman singkat fakta, waktu, dan hal-hal lain harus disusun secara sistematis dengan bukti-bukti yang diperoleh dari persidangan di pengadilan, menetapkan ketentuan pemeriksaan hakim dan menentukan kesalahan terdakwa. Berdasarkan amar putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tbn. Hakim yang bertugas menyidangkan kasus-kasus penghakiman terhadap terdakwa IAAP menjatuhkan pidana penjara

selama 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) Bulan, IAAP telah dibuktikan di pengadilan dan diyakinkan bahwa perbuatan pidana terhadapnya telah ditetapkan melakukan penipuan dalam bentuk investasi atau trading sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hakim mempertimbangkan sumber fakta hukum yang diungkapkan dalam proses pengadilan, undang-undang umum atau khusus yang terdaftar dalam item yang dibuat oleh jaksa penuntut alternatif, dan penerapan putusan pada IAAP yang memuat kesaksian terdakwa dan saksi. Kami telah mengambil langkah-langkah untuk Majelis Non Yudisial pertimbangan beberapa fakta yang diperoleh saat ini, kemudian fakta-fakta yang diperoleh dan diperdebatkan di Persidangan, dan latar belakang perbuatan Terdakwa bertindak secara seksama dan seksama terhadap terdakwa yaitu Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur barangsiapa, yang bermaksud menyerahkan sesuatu kepada diri sendiri atau mengeluarkan atau melepaskan hutang dengan maksud memperoleh keuntungan yang tidak sah untuk diri sendiri/orang lain dengan menggunakan nama palsu melalui rantai penipuan atau kebohongan membujuk orang lain untuk melakukan, melakukan, berpartisipasi. Bahkan jika itu adalah kejahatan atau cedera, banyak tindakan terkait dan harus dianggap sebagai rangkaian tindakan.

Pertimbangan Majelis Hakim adalah penerapan aturan hukum pidana berasal dari pihak JPU yang dimasukkan dalam dakwaan, Hakim memilih untuk menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku dengan delik penipuan investasi melalui trading terhadap putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tbn. yang cocok dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Umum dan Khusus, KUHP. Terdakwa telah didakwakan dengan penjatuhan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana telah disusun dalam surat dakwaan oleh JPU yang sudah memenuhi syarat materiil & formil.

Di dalam uraian tuntutan yang sudah dijatuhkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam dakwaan alternatif menjatuhkan terdakwa yang terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sudah didasari dengan fakta hukum, di mana acuannya sudah dimasukkan dalam persidangan yang sumbernya berasal

dari para saksi & juga informasi secara detil dari Terdakwa IAAP, jadi penerapan ketentuan norma hukum pidana dalam kasus perkara ini yaitu Pasal 378 Juncto. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto. Pasal 64 ayat (1) KUHP, apabila secara sistematis disesuaikan dengan beberapa fakta yang timbul dalam perkara-perkara yang diuraikan dalam persidangan ini dan terbukti bahwa terdakwa mempunyai kecakapan hukum yang cukup menurut undang-undang & juga bukan wali, maka terdakwa akan amempertanggung jawabkan perbuatannya.

Penalaran hukum para hakim, dipelajari dengan seksama dan dipelajari dengan baik, termasuk bentuk sanksi pidana terhadap terdakwa IAAP terhadap putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tbn. terdakwa dipidana pidana penjara 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan yang sudah dijalani Terdakwa dan menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Terdakwa telah ditahan dikarenakan terbukti bersalah melakukan perbuatan delik pidana penipuan serta melakukan penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam hal ini ada pertimbangan yuridis tentang pembagian ketentuan pidana kepada pelaku dan hakim membahas secara musyawarah baik kenyataan hukum yang timbul selama persidangan berlangsung, keterangan tentang para saksi, maupun keterangan tentang terdakwa. Telah melakukan pemeriksaan kelengkapan alat bukti dalam persidangan, kepercayaan hakim pembantu, hal yang bersangkutan dengan perkara yang terkait & penjatuhan pidana yang diberikan dalam putusan tetap dalam kategori biasa serta mempunyai pengaruh yang membuat jera terdakwa untuk tidak melakukannya. Setiap pelanggaran publik yang mengulangi tindakan yang dilakukan atau kesalahan terkait lainnya.

Diharapkan dengan adanya peristiwa ini dapat membantu masyarakat membedakan antara investasi yang sah dan yang haram di masa yang akan datang. Ini dapat dicapai jika orang dididik di bidang ekonomi dan hukum. Ini adalah tanggung jawab yang kami bagi dengan pemerintah, penyelenggara investasi, dan akademisi. Pemahaman hukum dan kesadaran hukum merupakan bagian yang sangat penting bagi investor, karena pemahaman hukum dapat menentukan kepatuhan dan perlindungan hukum investor dan pihak terkait. (Natanael et al., 2021).

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan dalam investasi melalui *trading* disertai adanya turut serta melakukan kecurangan yang dilakukan secara terus menerus sebagai suatu proses yang berkelanjutan adalah menggunakan pasal 378 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jenis sanksi pidana yang diberikan Terdakwa berbentuk penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, biasanya digunakan untuk mengatasi penyimpangan kriminal dan menghukum para penjahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, C., Duffin, K. M. K., Hawkins, S., & Morales Rocha, V. M. (2019). The use of cryptocurrencies in the money laundering process. *Journal of Money Laundering Control*, 22(2). <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2017-0074>
- Buchanan, B. (2004). Money laundering - A global obstacle. *Research in International Business and Finance*, 18(1). <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2004.02.001>
- Geno, A. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>
- Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>
- Mahyani, A. (2019). HARMONISASI HAK PISTOLEE DENGAN KETENTUAN FASILITAS NARAPIDANA. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2263>
- Mardhatillah, A. B., & Mahyani, A. (2019). BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). *Mimbar Keadilan*, 12(1). <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167>
- McDowell, J., & Novis, G. (2001). The Consequences of Money Laundering and Financial Crime. *Economic Focus*, 6(2).
- Natanael, L., Lauren, C. C., Kristina, D., & Ruchimat, T. (2021). PENGATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA TENTANG INVESTASI BODONG (FOREX ILEGAL). *Prosiding SENAPENMAS*. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15147>
- Pendapat, P., Di, D. P., Negeri, P., Dan, Y., & Sleman, N. (2011). Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Widodo, I. G., & Efendi, J. (2014). Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Sutedi, A. (2008). Tindak Pidana Pencucian Uang. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arto, M. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang. (1984). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung.